

IMPLEMENTASI PROGRAM SISMANTIK (SISWA PEMANTAU JENTIK) PADA SEKOLAH DASAR SWASTA DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DANGUE DI DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Oleh:

Lina Aryanti , Zainal Hidayat
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Student Role in Larva Monitoring (Siswa Pemantau Jentik) is Dangué Hemorrhagic Fever (DHF) control efforts to empower elementary school students to observe the presence of mosquito larvae in the school environment Implementation sismantik program at a private elementary school in Semarang is one of the measures to reduce the death rate of DHF patients in school age children in the city of Semarang. DHF control efforts through monitoring mosquito larvae have been arranged in Semarang City Regional Regulation No. 5 of 2010. The implementation of the monitoring program of mosquito larvae on private elementary school in Semarang in fact still not optimally implemented on all private schools in Semarang it was proven that their school has not been up to implement the program sismantik regularly in private elementary school. Sismantik program conducted in private elementary school in Semarang are still not optimally implemented because there is still a private elementary school that has not routinely perform these government programs.. The purpose of study is to describe the implementation of Student Role in Larva Monitoring (siswa pemantau Jentik) program in private school is controlling dangué disease in Semarang and to identify in habiting factor of Student role in Larva Monitoring program in private school in Semarang. This research is a descriptive study with qualitative approach. The result showed that there are things that inhibit the implementation of the program. This is caused by the weak human resources, communication, characteristic office executive (bureaucratic structure). Recommendation that can be given is improving quantity and quality of human resources, improving communications between the policy implementer and making a clear organization structure that can be understood easily.

Keyword: Policy Implementation, Human Resources, communication, Structure bureaucratic

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyakit Demam Berdarah Dangué (DBD) merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat dan endemis serta menimbulkan kejadian luar biasa diseluruh Kota/Kabupaten di Indonesia. Hal ini membuat penyakit DBD ini menjadi salah satu penyakit yang terus menerus

terjadi di seluruh Propinsi yang ada di Indonesia salah satu provinsi yang banyak terjangkit penyakit DBD yaitu Provinsi Jawa tengah tepatnya di Kota Semarang.

Berdasarkan Incident Rate DBD Kabupaten/Kota di Indonesia di atas menunjukkan bahwa Kota Semarang masuk ke dalam sepuluh besar Incidence Rate (IR)

DBD Kabupaten dan Kota di Indonesia pada tahun 2014 dan hal tersebut membuktikan bahwa saat ini penyebaran penyakit Demam Berdarah Dangué (DBD) dan angka kematian Demam Berdarah Dangué (DBD) di Kota Semarang masih relatif tinggi sehingga berpotensi terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) Di Kota Semarang. Oleh karena itu untuk mewujudkan keterpaduan pengendalian penyakit Demam Berdarah Dangué (DBD) diperlukan penanganan yang melibatkan semua pihak.

Penyakit Demam Berdarah yang semakin menjadi masalah kesehatan masyarakat dan endemis di Kota Semarang sehingga permasalahan ini memerlukan penanganan yang serius. Maka dari itu Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dangué. Peraturan Daerah tersebut digunakan untuk mengendalikan penyakit Demam Berdarah Dangué di Kota Semarang dengan melalui 3 upaya yaitu Pembarantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3 M Plus, pemeriksaan jentik, dan penyuluhan kesehatan. Indeks risiko tinggi. Jawa Tengah merupakan Provinsi yang memiliki potensi bencana yang relatif tinggi.

Penderita DBD menurut kelompok umur kasus DBD tahun menunjukkan bahwa anak yang berusia 5-9 memiliki presentasi sebanyak 30 persen lebih tinggi dibandingkan dengan usia 10-14 yang memperoleh 20 persen, hal tersebut menunjukkan bahwa anak usia 5-9 memiliki tingkat terserang penyakit DBD tinggi dan tingkat potensi terkena penyakit DBD pada anak usia sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan usia dewasa. Hal inilah yang membuat pemerintah membuat suatu program untuk mengendalikan penyakit DBD di lingkungan sekolah melalui program pemantauan jentik nyamuk yang dilakukan oleh anak sekolah

Program siswa pemantau jentik atau yang biasa disebut sismantik merupakan sebuah upaya untuk mengendalikan penyakit DBD di kota semarang dengan melibatkan

semua sekolah dasar yang ada di kota semarang baik negeri maupun swasta. Namun pada kenyataannya program ini masih belum maksimal dijalankan pada sekolah dasar swasta yang ada di kota semarang.

Pelaksanaan program sismantik (siswa pemantau jentik) yang di buat oleh dinas pendidikan kota semarang pada sekolah dasar swasta di kota semarang dilaksanakan di beberapa sekolah dasar swasta di kota semarang. Pada penelitian ini peneliti memilih 2 sekolah dasar swasta yaitu sekolah SDS AL-Azhar 14 dan SDS Don Bosko Kota Semarang, sekolah tersebut merupakan sekolah yang belum maksimal dalam menjalankan program pemantauan jentik yang dilakukan oleh anak sekolah.

Pelaksanaan program sismantik yang dilakukan oleh 2 sekolah ini masih menemui kendala yang menyebabkan pelaksanaan menjadi terhambat, ada beberapa permasalahan yang menyebabkan pelaksanaan program sismantik dilakukan tidak secara optimal diantaranya komunikasi dan struktur birokrasinya. Permasalahan Komunikasi antara dinas pendidikan yang notabene sebagai pihak yang bertanggung jawab memonitoring pelaksanaan program ini tidak melakukan komunikasi secara rutin dengan pihak sekolah dasar swasta dan pihak puskesmas yang terlibat, hal ini menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan program sismantik, bukan hanya itu saja tidak di bentuknya secara jelas struktur birokrasi pada tim monitoring juga menjadi penghambat dalam program pemantau jentik yang dilakukan oleh anak sekolah, sehingga masih terjadi keraguan pelaksanaan tugas karena tidak ada tupoksi yang jelas.

Permasalahan lainnya adalah masih kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan program siswa pemantau jentik. Sumber daya manusia yang ada belum sepenuhnya tersedia. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program tersebut peneliti melakukan penelitian

tentang tentang Implementasi Program Sismantik (Siswa Pemantau Jentik) Pada Sekolah Dasar Swasta Dalam Upaya Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dangu Di Dinas Pendidikan Kota Semarang

B. TUJUAN

Tujuan penelitian mengenai Implementasi Program Sismantik (Siswa Pemantau Jentik) Pada Sekolah Dasar Swasta Dalam Upaya Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dangu Di Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah :

1. Menganalisis implementasi program sismantik (siswa pemantau jentik) pada Sekolah Dasar Swasta yang dilakukan oleh dinas pendidikan sebagai upaya dalam Pengendalian DBD di Kota Semarang.
2. Mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi program sismantik (siswa pemantau jentik) pada sekolah dasar swasta sebagai upaya dalam melaksanakan regulasi pengendalian DBD di kota semarang .

C. TEORI

C. 1. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Menurut van Meter dan van Horn (Agustino, 2014: 139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Sementara itu, Grindle (Winarno, 2012:149) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu ikatan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya 'a policy delivery system,' dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan yang diinginkan.

Dari defisini para ahli diatas, implementasi merupakan hal yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan.

Implementasi merupakan suatu tujuan atau sasaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran yang berkenaan dengan kegiatan atau program dimana pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil atau output yang sesuai dengan tujuan.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Sementara itu, Grindle (dalam Winarno, 2012:149) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahap yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan melalui tahapan-tahapan tertentu yang dibentuk dalam serangkaian program atau kegiatan di mana dilakukan dan didukung oleh sumber daya yang ada, diolah, dikelola, dan diatur sedemikian rupa guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam suatu pelaksanaan implementasi kebijakan, beberapakali terjadi ketidaksesuaian atau ketidakpastian pelaksana sehingga gagal dalam memberikan manfaat atau tujuan kepada objek atau sasaran dari kebijakan. Hal ini sangat memprihatikan, mengingat sebagai apapun suatu kebijakan dibuat, apabila dalam pengimplementasiannya ternyata tidak sesuai dan menyimpang jauh dari tujuan maka kebijakan tersebut sangatlah sia-sia. Nugroho dalam bukunya "*Public Policy*" lebih memaparkann bahwa pada dasarnya implemmentasi kebijakan senantiasa dilakukan oleh dua aktor atau secara bersama-sama, yakni; *state and society*, karena

kebijakan public adalah juga kepentingan dari dua aktor yang sama; *state and society*.

Masalah kemudian muncul ketika terdapat pertanyaan mengenai prinsip – prinsip pokok dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang efektif. Pada dasarnya terdapat lima “tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan (Nugroho, 2014: 686-688) yaitu:

- a. Ketepatan Kebijakan
Ketepatan kebijakan menyangkut seberapa jauh kebijakan yang ada dapat menyelesaikan permasalahan yang hendak dipecahkan dan bagaimana kejelasan isi kebijakan yang sesuai dengan permasalahan di masyarakat.
- b. Ketepatan Pelaksana
Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah, namun juga dapat dilaksanakan melalui kerjasama pemerintah, swasta maupun masyarakat. Ketepatan pelaksana ini dengan melihat pertama yaitu aktor implementasi kebijakan yang berperan penting dalam pelaksanaan Kebijakan. Kedua adalah keterlibatan swasta dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan.
- c. Ketepatan Target
Ketepatan target ini berkenaan dengan bagaimana kondisi target dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan apakah implementasi kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang mungkin sama tidak efektifnya dengan kebijakan lain. Ketepatan target dinilai dari respon masyarakat terhadap pelaksanaan Kebijakan oleh implementor dan adanya intervensi mengenai apakah kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang pada prinsipnya terkait pula dengan kebijakan lain yang dilaksanakan oleh implementor sehingga menimbulkan ketidakefektifan.
- d. Ketepatan Lingkungan
Ketepatan lingkungan ini dilihat dari pertama, adalah lingkungan internal kebijakan mengenai interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan lembaga pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kedua adalah lingkungan

eksternal kebijakan, dengan melihat bagaimana interpretasi lembaga startegis seperti media massa maupun kelompok-kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan.

e. Ketepatan Proses

Ketepatan proses ini berkenaan dengan bagaimana kesiapan masyarakat dan kesiapan pelaksana kebijakan. Sikap tersebut dilihat dari bagaimana mereka memahami, menerima, dan siap menjadi bagian dari kebijakan.

C.2 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik juga akan lebih mudah dipelajari dengan bantuan penggunaan model. Mustopadidjadja dalam (Suwitri 2009 : 35) merumuskan model adalah penyederhanaan dari kenyataan persoalan yang dihadapi, diwujudkan dalam hubungan – hubungan kausal atau fungsional. Model merupakan alat bantu yang baik dalam perumusan dan penentuan solusi atau alternatif yang dipilih dalam pembuatan kebijakan publik. Terdapat model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan di antaranya model implementasi George Edward III, model implementasi van Meter dan van Horn, model implementasi Merilee S. Grindle, model implementasi Charles O. Jones dan model implementasi Jan Merse.

1. Model Implementasi George C. Edwards III (1980). Dalam pandangan Edwards III dalam Subarsono (2013:90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) akan mengurangi distorsi implementasi (2) sumberdaya, Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial (3) disposisi, Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor,

seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. (4) struktur birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedures* atau SOP). Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

2. Model Implementasi Merilee S. Grindle (1980). Keberhasilan implementasi menurut Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan; (2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci; dan (6) apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.
3. Model Implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975). Menurut Meter dan Horn, ada lima variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni: (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; dan (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik.
4. Model Implementasi Charles O. Jones. Jones (dalam Tahir, 2014:81) mengatakan bahwa: Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoprasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga

aktivitas utama kegiatan. Menurut Jones ketiga aktivitas tersebut dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Tiga aktivitas dimaksud adalah:

- a. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan,
 - b. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan
 - c. Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.
5. Model Implementasi Jan Merse. Model implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Jan Merse (dalam Tahir, 2014:93), menegaskan bahwa: *“Model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh factor-faktor sebagai berikut: 1) faktor informasi, 2) isi kebijakan, 3) dukungan masyarakat, dan 4) pembagian potensi. Khusus dukungan masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan program”*. Penegasan di atas membuktikan bahwa karena pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap implementasi kebijakan pada program pembangunan, maka setiap implementasi program tetap membutuhkan dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakat sebagai stakeholder.

D. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Untuk mendapatkan narasumber yang tepat dan sesuai tujuan, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sistem *purposive*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan observasi.

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan disini adalah hal-hal mengenai kesesuaian kebijakan yang telah dirumuskan dengan karakter masalah yang akan dipecahkan. Ketepatan kebijakan ini dapat dilihat

dari karakteristik utama permasalahan yang akan di pecahkan, tujuan dari pembuatan kebijakan, serta keakuratan program.

a. Karakteristik utama permasalahan

Karakteristik utama permasalahan yaitu ciri yang menunjukkan keadaan dimana ada perbedaan antara “das sollen” (yang seharusnya) dengan “das sein” (yang senyatanya). Karakteristik utama permasalahan dalam hal ini merupakan permasalahan DBD yang terjadi di kota Semarang, permasalahan penyakit DBD di kota Semarang banyak di derita oleh siswa siswi usia sekolah dasar, hal tersebut merupakan suatu hal yang baru di temukan di bidang kesehatan dengan mengetahui karakteristik permasalahan yang ada maka akan mudah untuk memecahkan permasalahan tersebut.

b. Tujuan dari pembuatan kebijakan

Tujuan kebijakan adalah sebuah upaya pemerintah yang telah di rencanakan untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Tujuan kebijakan merupakan salah satu hal yang ada dalam ketepatan kebijakan, Tujuan kebijakan ini termuat dalam Peraturan Daerah nomer 5 tahun 2010, dalam peraturan tersebut termuat tujuan adanya program sismantik ini dilakukan sebagai upaya untuk mengendalikan penyakit DBD di kota Semarang

c. Keakuratan program

Keakuratan program sismantik juga dinilai sudah sesuai jelas dan dapat dipahami, hal itu dukung dari adanya regulasi yang mengatur yaitu adanya peraturan daerah kota Semarang yaitu perda nomer 5 tahun 2010 tentang pengendalian penyakit DBD di Kota Semarang dan petunjuk teknis PSN anak sekolah yang memuat program pemantauan jentik anak sekolah.

2. Ketepatan Pelaksana

Ketepatan pelaksana adalah kesesuaian antara kebijakan yang akan dilaksanakan dengan aktor yang terlibat. Dalam setiap implementasi program terdapat aktor dibalik kesuksesan program tersebut. Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerja sama antara pemerintah-masyarakat/ swasta, atau implementasi yang diswastakan (Nugorho, 2014:686).

a. Ketepatan aktor

Ketepatan aktor adalah kesesuaian pihak yang ikut terlibat dalam sebuah kebijakan baik seseorang ataupun lembaga yang ikut terlibat dalam sebuah kebijakan dimana mereka bertanggung jawab atas proses implementasi. Dalam pelaksanaan program sismantik ini dinas pendidikan kota Semarang turut terlibat untuk menjalankan program sismantik, keterlibatan dinas pendidikan kota Semarang dalam pelaksanaan program sismantik telah sesuai dengan tupoksi yang diberikan kepada dinas pendidikan kota Semarang melalui perintah dari Sekda yang menunjuk dinas pendidikan untuk memonitoring pelaksanaan program sismantik di sekolah swasta.

b. Keterlibatan siswa siswi sekolah dasar di kota Semarang, guru, tenaga kesehatan dalam pelaksanaan program

Keterlibatan adalah bentuk keikutsertaan suatu pihak untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan program. Keterlibatan pihak pelaksana yaitu tim teknis seperti kedua sekolah dasar swasta yaitu sekolah dasar swasta Al-Azhar 14 dan sekolah dasar swasta Don Bosko Kota Semarang dalam program ini cukup baik karena di dalam memberikan pemahaman kepada siswa siswi, pihak sekolah mencoba untuk mengajak mereka menyenangi kegiatan itu, hal ini nyatanya di dukung oleh respon siswa siswi juga, namun di dalam pemantauan jentik nyamuk yang dilakukan oleh siswa siswi ini di perlukan pendampingan dari guru Pembina UKS agar dapat berjalan dengan baik.

3. Ketepatan Target

Ketepatan target adalah kesesuaian kebijakan yang melibatkan kelompok atau perseorangan yang menjadi sasaran dalam sebuah proses implementasi.

a. Kefokusan program

Kefokusan program adalah konsentrasi penuh terhadap suatu program. Kefokusan program mempunyai makna bahwa di dalam suatu program harus mengedepankan tujuan yang telah dibuat dan tidak ada intervensi

dari kebijakan yang lain ataupun terjadi tumpang tindih antar kebijakan,

b. Kesiapan sekolah dasar swasta dalam melaksanakan program sismantik

Kesiapan adalah kesediaan untuk memberikan respon pada suatu hal. Kesiapan pihak sekolah dalam melaksanakan program sismantik adalah bentuk kesediaan untuk memberikan respon pada sebuah program pemerintah yaitu program siswa pemantau jentik yang dilakukan pada sekolah dasar swasta.

4. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan adalah keadaan lingkungan yang kondusif dalam implementasi, baik di lingkungan kebijakan maupun luar kebijakan. Sedangkan Ketepatan lingkungan erat kaitannya dengan interaksi yang terjadi diantara perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan.

a. interaksi

Interaksi adalah tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Interaksi merupakan suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Interaksi yang tidak berjalan dengan baik, menyebabkan penyampaian informasi mengenai pentingnya mengendalikan penyakit DBD di kota Semarang tidak tersampaikan secara tepat dan merata kepada seluruh sekolah dasar swasta yang ada di kota Semarang, sehingga masih terdapat sekolah swasta yang belum melakukan program ini. Interaksi yang terjalin belum dilakukan secara konsisten dan menyeluruh. Selain itu karena masih kurangnya koordinasi yang rutin hal tersebut dapat diketahui dari interaksi, interaksi dapat diketahui melalui kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan dengan kepala sekolah dan guru Pembina UKS serta pihak puskesmas hanya melalui surat edaran, hal tersebut dianggap cukup untuk mengetahui informasi dalam pelaksanaan program sismantik yang dilakukan pada sekolah dasar swasta. Namun hal tersebut belum cukup efektif tanpa koordinasi yang rutin dilakukan

5. Ketepatan Proses

Ketepatan proses adalah kesesuaian dalam urutan pelaksana dalam pencapaian suatu tujuan. Ketepatan proses disini secara garis besar melihat bagaimana para pelaksana kebijakan menjalankan suatu program maupun kebijakan dilihat dari apakah mereka telah memahami, menerima, dan siap untuk menjadi bagian dari kebijakan bagi masyarakat target kebijakan dan siap menjadi pelaksana kebijakan bagi pemerintah. Pada Ketepatan proses hal yang dibahas yaitu kesiapan pelaksana program dan partisipasi dari pihak sekolah dasar swasta yang terlibat

a. Kesiapan Pelaksana Program

Kesiapan pelaksana adalah keseluruhan kondisi individu atau kelompok untuk menanggapi suatu program tertentu. Suatu program dapat dikatakan berhasil apabila dalam pelaksanaan kebijakan memahami bahwa program tersebut sangat penting untuk dilaksanakan. Kesiapan tim pelaksana dalam suatu implementasi sangat berpengaruh dan akan keberhasilan atau tidaknya upaya-upaya dalam kebijakan atau program dapat berjalan dengan efektif, efisien dan dapat mencapai hasil yang maksimal. Kesiapan pihak sekolah dasar dalam memahami adanya program ini sangat dibutuhkan, karena pihak sekolahlah yang nantinya akan menggerakkan siswa-siswi untuk melaksanakan program ini, berdasarkan hasil penelitian pihak sekolah swasta yang terlibat dalam pelaksanaan program ini telah siap melaksanakan dan memahami program ini karena telah ada surat edaran yang menyatakan secara jelas tujuan diadakannya program ini.

b. Partisipasi Pihak Sekolah dalam memahami dan terlibat dalam pelaksanaan program.

Partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta ataupun keterlibatan. Partisipasi pihak sekolah dasar swasta dalam pelaksanaan program ini adalah bentuk keterlibatan pihak sekolah dalam suatu program yang diadakan oleh pemerintah, partisipasi pihak yang ikut terlibat dalam melaksanakan program dapat dikatakan berhasil apabila dalam

pelaksanaan kebijakan memahami bahwa program tersebut sangat penting untuk dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pemantauan jentik yang dilakukan oleh siswa ini pihak sekolah turut berpartisipasi untuk melancarkan program yang dibuat pemerintah ini melalui pemahaman kepada siswa siswi terkait dampak yang akan di terima jika program ini berjalan dengan baik, Antusiasme tinggi yang ditunjukkan oleh anak-anak dalam melakukan pemantauan ini juga menunjukkan tingkat partisipasi yang baik dalam pelaksanaan program sismantik pada sekolah dasar swasta.

B. Faktor Penghambat

1. Faktor Penghambat

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya adalah segala sesuatu , baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang digunakan untuk mencapai hasil. Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Dibutuhkan sumber daya yang mencukupi baik secara kuantitas maupun kualitas agar implementasi dapat terlaksana dengan baik dan tepat. Pada pelaksanaannya sejauh ini sumber daya manusia menjadi faktor penghambat pada proses Implementasi Program sismantik (siswa pemantau jentik) pada sekolah dasar swasta dalam upaya pengendalian penyakit DBD di dinas pendidikan kota semarang. Sumber daya manusia adalah individu ataupun sekelompok orang yang siap, siaga, dan mampu dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. yang ada di kota semarang, sehingga dalam implementasinya belum maksimal. Kendala yang ada pada aspek sumber daya manusia dalam pelaksanaan program sismantik yaitu dengan belum tercukupinya jumlah tenaga monitoring ke seluruh sekolah dasar swasta yang ada di kota semarang yang bertugas dalam menyampaikan informasi serta memantau pelaksanaan program tersebut di setiap

sekolah dasar swasta yang ada di kota semarang .

b. Komunikasi

Komunikasi organisasi adalah bentuk penyampaian informasi melalui pertukaran pikiran ataupun informasi di dalam suatu organisasi. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Komunikasi merupakan hal penting dalam proses implementasi kebijakan. Adanya kejelasan tujuan dan sasaran harus ditransmisikan kepada implementor dan masyarakat sehingga implementor dan masyarakat memahami pelaksanaan kebijakan tersebut. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, maka kemungkinan kebijakan yang dibuat tidak akan efektif.

Komunikasi merupakan faktor penghambat dalam implelementasi ini. Meskipun komunikasi dalam program ini sudah dilakukan dengan melalui surat edaran yang disampaikan kepada sekolah dasar swasta serta sudah dilakukan dengan baik melalui cara yang tepat yaitu sosialisasi, penyuluhan, pembinaan. Namun hal ini tidak cukup, diperlukan komunikasi yang intensif dan berkelanjutan antar pihak sekolah dengan pihak dinas pendidikan serta pihak yang lain seperti puskesmas dan tenaga survailens , pihak-pihak tersebut tidak bisa berjalan sendiri-sendiri tanpa danya koordinasi yang rutin. Dalam penelitian ini faktor penghambat Komunikasi dapat dijabarkan menjadi 3 yaitu mekanisme , intensitas komunikasi dan koordinasi.

a) Mekanisme

Mekanisme merupakan suatu tata alur yang jelas dan mudah dipahami dalam melakukan suatu hal, mekanisme dibuat untuk mempermudah hubungan komunikasi yang ada, mekanisme merupakan suatu

hal penting dalam proses implementasi, semua hal tersebut dalam implementasi kebijakan akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Mekanisme komunikasi pada pelaksanaan program sismantik belum berjalan dengan baik karena mekanisme komunikasi antara kita sebagai tim monitoring dengan sekolahan (tim teknis) dalam program ini hanya melalui surat edaran. Hal itu dinilai tidak cukup efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b) intensitas komunikasi

Intensitas komunikasi adalah keadaan tingkatan yang berkaitan dengan seberapa lama komunikasi itu berjalan guna mencapai suatu tujuan. Pada konteks ini suatu komunikasi sangat penting karena suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut (*clarity*) dan konsistensi informasi yang disampaikan. Intensitas komunikasi yang terjadi pada pelaksanaan program sismantik masih belum berjalan dengan baik karena intensitas dalam melakukan rapat tidak dilakukan secara rutin sehingga penyampaian informasi yang dilakukan kurang jelas dalam prosesnya

c) koordinasi

Koordinasi adalah proses perpaduan sasaran dan kegiatan dari unit-unit kerja yang terpisah untuk dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif. Selain itu koordinasi juga perlu dipertimbangkan dalam melakukan komunikasi. Unsur koordinasi dalam komunikasi organisasi masih belum berjalan dengan baik karena tidak ada koordinasi yang rutin dan jelas dalam memonitoring pelaksanaan program sismantik, maka dari itu penyampaian informasi menjadi kurang jelas dan akan ikut berpengaruh dalam pelaksanaan program yang dijalankan.

c. Karakteristik Jawatan Pelaksana

Karakteristik jawatan pelaksana (struktur birokrasi) adalah sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. daya dukung struktur birokrasi inilah yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan. Struktur birokrasi disini berkaitan dengan standar operasional prosedur (SOP) yang dimiliki oleh seluruh implementor atau pembagian tanggung jawab suatu kebijakan maupun program kepada instansi terkait dalam rangka implementasi program sismantik pada sekolah dasar swasta di kota semarang. Karakteristik jawatan pelaksana

(struktur birokrasi) dalam penelitian ini menjadi penghambat pelaksanaan program sismantik, pasalnya belum ada struktur organisasi yang jelas pada tim monitoring yang dibentuk oleh dinas pendidikan hanya dinas pendidikan menunjuk bidang monitoring untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan program sismantik

a) Standar Operational Procedure (SOP)

Standar Operational Procedure (SOP) adalah suatu pedoman untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah. SOP ini merupakan perkembangan dari tuntunan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas (Winarno 2005 :150). Dengan SOP ini, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh institusi pemerintahan akan memiliki standar pelaksana, waktu pelaksanaannya. Selain itu dengan adanya SOP urutan kerja bisa diidentifikasi secara nyata sehingga dalam pelaksanaan suatu program yang akan dijalankan akan lebih jelas.

Dalam karakteristik jawatan pelaksana (struktur birokrasi) yaitu terkait dengan standar operasional prosedur (SOP) masih terkendala karena didalam implementasi program sismantik unsur yang perlu diperhatikan yaitu unsur SOP. Standar operasional prosedur atau yang biasa disebut SOP masih kurang jelas, karena tidak di bentuk struktur yang

sistematis dalam program ini, para aktor hanya bertugas sendiri-sendiri, sehingga struktur organisasi atau birokrasi masih kurang jelas dan mengakibatkan hubungan formal antara tugas dan wewenang yang seharusnya digunakan untuk mengendalikan serta mengkoordinasikan sumberdaya yang ada tapi dalam hal ini masih belum mencapai tujuan yang diinginkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Program Sismantik (Siswa Pemantau Jentik) Pada Sekolah Dasar Swasta Dalam Upaya Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dangué di Dinas Pendidikan Kota Semarang

Tahap implementasi merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan kebijakan. Tahap ini adalah tahapan untuk mengetahui tentang bagaimana proses pelaksanaan dari kebijakan yang ada pada tahap implementasi, akan menentukan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan mencapai keberhasilan atau sebaliknya. Sehingga suatu kebijakan yang baik apabila manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Implementasi Program sismantik (siswa pemantau jentik) pada sekolah dasar swasta di Kota Semarang sebagai upaya pengendalian penyakit DBD di dinas pendidikan kota Semarang yang dilihat melalui 5 ketepatan implementasi.

Pada ketepatan kebijakan sudah berjalan dengan baik karena sudah ada peraturan yang mengatur adanya program tersebut, kemudian di dalam ketepatan pelaksana dan ketepatan target juga sudah berjalan dengan baik karena setiap aktor yang terlibat sudah mengetahui perannya masing-masing yang tertulis di dalam petunjuk teknis serta sehingga sasaran utama dalam

pelaksanaan pemantauan jentik ini mampu memberdayakan anak sekolah untuk turut mengendalikan penakit DBD yang ada di kota Semarang.

Pada ketepatan proses sudah berjalan dengan baik karena sekolah swasta yang terlibat dalam pelaksanaan program sismantik ini turut senang berpartisipasi dan telah siap dengan program yang dibuat pemerintah terkait upaya pengendalian DBD yang dilakukan di sekolah dasar swasta. Namun dalam ketepatan lingkungan masih belum maksimal pada pelaksanaannya.

Ketepatan lingkungan masih menemui kendala dalam implementasinya yaitu belum seluruh sekolah swasta melakukan pemantauan jentik nyamuk di sekolahnya masing-masing dikarenakan interaksi yang terlain masih belum menyeluruh dan belum konsisten.

Interaksi pihak internal dinas pendidikan masih belum berjalan dengan baik dan juga interaksi yang terjalin antara dinas pendidikan dan sekolah dasar swasta yang ada di kota Semarang masih belum terjalin koordinasi yang baik hal inilah yang menyebabkan pelaksanaan dalam pelaksanaan program ini belum berjalan dengan baik.

Pada faktor-faktor yang menghambat pada proses Implementasi Program sismantik (siswa pemantau jentik) pada sekolah dasar swasta sebagai upaya pengendalian penyakit DBD di dinas pendidikan kota Semarang meliputi faktor sumber daya, komunikasi dan karakteristik jawatan pelaksana (struktur organisasi). Keseluruhan faktor penghambat tersebut merupakan faktor-faktor yang bersumber dari dalam lingkungan pemerintahan sehingga seluruh faktor-faktor yang menjadi penghambat pada implementasi program sismantik (siswa pemantau jentik) merupakan faktor internal.

Faktor sumber daya pada aspek sumber daya manusia dalam implementasi program sismantik terkendala dengan belum tercukupinya sumber daya manusia yang dibutuhkan terutama di dalam tim monitoring untuk pelaksanaan pemantauan jentik nyamuk Demam Berdarah Dangué di sekolah dasar swasta di kota Semarang

Faktor komunikasi yang kurang baik dilakukan antara tim monitoring dan tim pelaksana, komunikasi antara dinas pendidikan dengan pihak sekolah dasar swasta, serta

puskesmas tidak berjalan dengan, komunikasi yang terjadi antar pihak pelaksana jarang dilakukan sehingga hal tersebut menimbulkan kendala dalam penyampaian informasi serta mengambat pelaksanaan program karena tidak adanya hubungan komunikasi mengenai kejelasan waktu pada saat monitoring dari dinas pendidikan ataupun proses penyuluhan dari pihak puskesmas sehingga menyebabkan pelaksanaan tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya persiapan dari pihak sekolah dasar swasta.

Karakteristik jawatan pelaksana (struktur birokrasi) yang masih tidak jelas menjadi penghambat pelaksanaan program sismantik, karena belum ada struktur organisasi dan SOP yang jelas pada tim monitoring yang dibentuk oleh dinas pendidikan, hal ini menyebabkan tupoksi yang dilakukan juga tidak jelas dan tidak terarah, sehingga di dalam pelaksanaan program sismantik ini tidak berjalan dengan baik dan tidak menyeluruh ke semua sekolah swasta yang ada di kota Semarang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan rekomendasi antara lain :

1. Pemerintah kota Semarang perlu mendorong program sismantik ini agar terlaksana di seluruh sekolah dasar yang ada di kota Semarang
2. Sumber daya terkait dengan SDM agar dapat ditingkatkan secara kuantitas dan kualitas agar pada proses pelaksanaan program sismantik dapat maksimal
3. Dalam pembuatan suatu program disarankan untuk memperbaiki kualitas komunikasi antar para pelaksana kebijakan agar seluruh program dan kegiatan dapat terkoordinir dengan baik antar SKPD ataupun antara tim monitoring dan tim pelaksanaan seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program sismantik di sekolah dasar swasta
4. Perlunya membuat struktur organisasi pada tim monitoring agar pemantauan yang dilakukan pada pelaksanaan program siswa pemantauan jentik di sekolah dasar swasta dapat merata dilaksanakan menyeluruh, sehingga koordinasinya bisa berjalan dengan baik
5. Pembentukan jadwal dalam pelaksanaan pemantauan jentik secara konsisten dan

terstruktur pada sekolah dasar swasta, agar pihak dinas pendidikan yang akan memonitoring dapat mengetahui jadwal pelaksanaan serta penyuluhan dari puskesmas yang terlibat dapat berjalan dengan baik.

6. Mengadakan rapat rutin antara dinas pendidikan, pihak sekolah dasar swasta yang melakukan pemantauan jentik di sekolah, serta pihak puskesmas dan tenaga surveilans dari dinas kesehatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program sismantik pada sekolah dasar swasta yang ada di kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung : Pustaka Setia.
- Agustino, Leo. 2014. Dasar- Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
- Hamdi, Muchlis. 2012. Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Herabudin. 2016. Studi Kebijakan Pemerintah dan filosofi ke Implementasi. Bandung : pustaka setia
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis dynamic Policy Analysis. Yogyakarta : Gava Media.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2011. Public policy (edisi ke tiga). Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta
- Prastowo, Andi. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Jogjakarta. Ar-Ruzz Media.
- Sukidin. 2009. Administrasi Publik. Jakarta : Laksbang Pressindo.
- Subarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik. Konsep,Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta

Suwitri, Sri. 2008. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta : Rineka Cipta

Tahir,Arifin . 2014 : kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan pemerintah daerah. Bandung : Alfabeta

Wahab, Solichin Abdul . 2008. Pengantar Analisis Kebijaksanaan. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2011. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus).

Yogyakarta: Caps.

Sumber internet

<http://lib.unnes.ac.id/18906/1/6450408134.pdf>
(diakses pada tanggal 14 oktober 2016 pukul 10.00 WIB)

www.hukor.depkes.go.id : (diakses pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 08.00)

Sumber Dokumen :

UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dangué.

Petunjuk Teknis Jumantik– PSN Anak Sekolah (Kementerian Kesehatan RI)